

5. PENUTUP

Dalam proses pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang menjadi hal penting agar pengembangan wilayah tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tata wilayah serta dapat mempercepat proses pembangunan perekonomian nasional. Perencanaan tata ruang ini kemudian erat kaitannya dengan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu kawasan khusus yang menjadi prioritas pembangunan perekonomian agar dapat berjalan secara optimal. Salah satu sektor ekonomi yang masuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah sektor pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sektor pariwisata di empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berdasarkan sektor unggulan atau sektor non-unggulan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat potensi perubahan klasifikasi sektor pariwisata pada kawasan tersebut di masa mendatang dari sektor unggulan menjadi sektor non-unggulan ataupun sebaliknya. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat berupa informasi mengenai klasifikasi sektor pariwisata di empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Indonesia serta perbandingan antara penetapan

Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan sektor unggulan dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan keputusan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient*. Secara matematis, alat analisis ini akan membandingkan nilai aktivitas perekonomian suatu sektor di wilayah studi dengan wilayah referensinya. Hal ini menyebabkan alat analisis ini umum digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang dimiliki suatu wilayah. Sektor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sektor pariwisata di empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nilai aktivitas perekonomian sektor pariwisata didapatkan dari penggabungan nilai PDRB subsektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum dan lapangan usaha jasa lainnya.

Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa sektor pariwisata di KEK Mandalika dan KEK Morotai merupakan sektor non-unggulan. Sedangkan sektor pariwisata di KEK Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Lesung merupakan sektor unggulan. Berdasarkan hasil analisis *Dynamic Location Quotient* diketahui bahwa nilai DLQ dari masing-masing kawasan berada dibawah angka satu. Hal ini mengindikasikan bahwa, sektor pariwisata di KEK Mandalika dan KEK Morotai tidak berpotensi menjadi sektor unggulan di masa mendatang. Sedangkan sektor pariwisata di KEK Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Lesung berpotensi mengalami perubahan menjadi sektor non-unggulan di masa mendatang.

Pada umumnya, keempat kawasan yang dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dikenal sebagai kawasan yang memiliki daya tarik wisata cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari keindahan alam yang dimiliki masing-masing kawasan. Namun berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kawasan Mandalika dan kawasan Morotai tidak unggul dalam sektor pariwisata. Perbedaan ini bisa terjadi karena karena beberapa faktor seperti ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisata, akses menuju kawasan serta kawasan wisata lain yang secara geografis berdekatan dan memiliki daya tarik lebih besar. Hal ini mungkin saja menyebabkan sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika dan Morotai tidak tercapai.

Sektor unggulan sendiri pada dasarnya bersifat dinamis sehingga bisa saja berubah setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis *Dynamic location Quotient* dapat dilihat bahwa nilai DLQ sektor pariwisata di setiap kawasan mendekati angka 1 (satu). Hal

ini bisa menjadi indikasi bahwa sektor pariwisata di setiap kawasan masih bisa diharapkan untuk menjadi sektor unggulan dimasa mendatang. Perubahan sektor non-unggulan menjadi sektor unggulan dapat dirangsang oleh pembangunan infrastruktur-infrastruktur pendukung yang pada saat ini terus berlangsung di tiap kawasan. Selain itu, pada dasarnya empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata ini memiliki *endowment factor* berupa kekayaan sumber daya alam. Faktor-faktor ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memilih kawasan yang tepat untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Secara garis besar hasil penelitian ini tidak sejalan dengan keputusan pemerintah dalam hal penetapan empat KEK Pariwisata. Khususnya untuk kawasan Mandalika dan Morotai yang tidak unggul dalam sektor pariwisata berdasarkan analisis LQ dan DLQ. Sedangkan untuk kawasan Tanjung Kelayang dan Tanjung Lesung berdasarkan hasil analisis DLQ, sektor pariwisata di kawasan ini berpotensi mengalami kemunduran. Dapat dikatakan bahwa dalam penentuan empat kawasan ini, pemerintah tidak mempertimbangkan analisis LQ dan DLQ. Kemungkinan lain adalah terdapat pertimbangan khusus oleh pemerintah dalam penetapan empat kawasan ini yang sulit diestimasi secara ekonomi, seperti aspek politik.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan yang secara langsung dirasakan penulis. Kekurangan pertama merupakan penentuan nilai PDRB sektor pariwisata di objek penelitian. Penulis tidak menemukan nilai PDRB sektoral yang secara langsung mewakili nilai PDRB sektor pariwisata di kawasan. Untuk itu penulis menggabungkan dua subsektor yang dianggap paling mewakili nilai aktivitas ekonomi sektor pariwisata di kawasan. Hal ini bisa saja menyebabkan tidak semua nilai aktivitas ekonomi di kawasan masuk ke dalam analisis. Kekurangan kedua adalah rentang waktu yang digunakan dalam penelitian. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan proyek jangka panjang yang dijalankan oleh pemerintah dan baru beberapa tahun berjalan. Sehingga masih terlalu dini untuk menilai tercapai atau tidaknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah.

Untuk menyempurnakan kekurangan penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Menggunakan data yang mencakup semua nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dalam kawasan yang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, penelitian ini menggunakan data hasil penjumlahan PDRB subsektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum serta lapangan usaha jasa lainnya untuk mewakili nilai PDRB sektor pariwisata. Hasil penelitian mungkin akan lebih baik jika data yang digunakan adalah data PDRB sektor pariwisata.

2. Menggunakan rentang waktu penelitian ketika seluruh Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata telah selesai dibangun dan beroperasi dengan sepenuhnya. Hal ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dapat menyebabkan sektor pariwisata di kawasan menjadi sektor unggulan.
3. Analisis LQ dan DLQ yang digunakan dalam penelitian ini belum memperhitungkan seluruh aspek yang mempengaruhi maju atau tidaknya sektor pariwisata dalam sebuah kawasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya adalah bagaimana memasukkan aspek 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) dan aspek 3G (Grade Batam, Grade Jakarta dan Grade Bali) ke dalam analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1993). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Guna Darma.
- Aswandi, H., & Kuncoro, M. (2002). Evaluasi penetapan kawasan andalan: studi empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 27-45.
- Badan Pusat Statistik. (2016, Mei 24). *Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB menurut lapangan usaha Serie 2010 atas dasar harga konstan (Triwulanan) tahun 2010-2017: <https://malut.bps.go.id/dynamictable/2016/05/24/106/pdrb-menurut-lapangan-usaha-serie-2010-atas-dasar-harga-konstan-triwulanan-tahun-2010-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2017, Juli 5). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Kabupaten Belitung Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah): <https://belitungkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/12/pdrb-kabupaten->

belitung-atas-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-juta-rupiah-.html

Badan Pusat Statistik. (2017, Juli 7). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah): <https://lomboktengahkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/07/72/pdrb-kabupaten-lombok-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-juta-rupiah-.html>

Badan Pusat Statistik. (2017, Juli 5). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Morotai*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Kabupaten Pulau Morotai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah): <https://morotai.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/39/pdrb-kabupaten-pulau-morotai-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-juta-rupiah-.html>

Badan Pusat Statistik. (2017, Juli 5). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2016: <https://pandeglangkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/61/pdrb-kabupaten-pandeglang-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010---2016.html>

Badan Pusat Statistik. (2017, Agustus 9). *Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Triwulanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010–2018: <https://babel.bps.go.id/dynamictable/2017/08/09/373/pdrb-triwulanan-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2018.html>

Badan Pusat Statistik. (2017, September 22). *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*. Retrieved Mei 2, 2018, from Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017: <https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/09/22/88/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-banten-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-2010-2017.html>

- Badan Pusat Statistik. (2017, Juli 4). *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved Mei 2, 2018, from PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2010 - 2016: <https://ntb.bps.go.id/dynamictable/2017/07/04/156/pdrb-provinsi-ntb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010---2016.html>
- Bank Indonesia. (2014). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved Mei 25, 2018, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ntb/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Nusa-Tenggara-Barat-Triwulan-III-2014.aspx>
- Bappenas. (2016). Pembangunan Pariwisata. *Multilateral Meeting I* (pp. 1-56). Jakarta: Kementerian Pariwisata. Retrieved Mei 25, 2018, from https://www.bappenas.go.id/files/penyusunan_rkp_2017/seri_multilateral_meeting/Pembangunan_Pariwisata_Update_2_Maret_2016.pdf
- Budiharsono, S. (2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2018, Februari 20). *Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia*. Retrieved April 15, 2018, from KEK Morotai: <http://kek.go.id/kawasan/Morotai>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2018, Februari 20). *Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia*. Retrieved April 13, 2018, from KEK Tanjung Lesung: <http://kek.go.id/kawasan/Tanjung-Lesung>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2018, Februari 20). *Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia*. Retrieved April 13, 2018, from KEK Tanjung Kelayang: <http://kek.go.id/kawasan/Tanjung-Kelayang>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2018, Februari 20). *Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia*. Retrieved April 14, 2018, from Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia: <http://kek.go.id/>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2018, Februari 20). *Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia*. Retrieved April 14, 2018, from KEK Mandalika: <http://kek.go.id/kawasan/Mandalika>

- Glasson, J. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional*. (P. Sitohang, Trans.) Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Husna, N., Noor, I., & Rozikin, M. (2012). Analisis pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 188-196.
- Kementerian Pariwisata. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian.
- Maslikhina, V. Y. (2016). Special economic zones in Russia: results evaluation and development prospects. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(SI), 275-279.
- Mukherjee, A., Pal, P., Deb, S., Ray, S., & Goyal, T. M. (2016). SEZs in select countries: a comparison with India. In A. Mukherjee, P. Pal, S. Deb, S. Ray, & T. M. Goyal, *Special Economic Zones in India* (pp. 15-50). New Delhi: Springer India.
- Nazipawati. (2007). Aplikasi model static dan dynamic location quotients dan shift-share dalam perencanaan ekonomi regional (studi kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi Regional*, 2(2), 81-86.
- Nel, E. L., & Rogerson, C. M. (2014). Re-spatializing development: reflections from South Africa's recent re-engagement with planning for special economic zones. *Urban Izziv*, 25(S), S24-S35. Retrieved Maret 8, 2018, from <https://search.proquest.com/docview/1620717953?accountid=31495>
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pati tahun 2000-2005. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 1-9.
- Ramesh, S. (2013). China's transition to a knowledge economy. *Journal of The Knowledge Economy*, 4(4), 473-491. Retrieved Maret 8, 2018, from <https://search.proquest.com/docview/1458214880?accountid=31495>
- Richardson, H. W. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (P. Sihotang, Trans.) Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sambodo, M. T. (2002). Analisis sektor unggulan Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 33-54.

- Simanjuntak, D., & Sirojuzilam. (2013). Potensi wilayah dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 134-150.
- Soilen, K. S. (2012). *Geoeconomics*. London: Bookboon.
- Sokoloff, L. K., & Engerman, S. L. (2000). History lessons: institutions, factor endowments and path of development in the new world. *The Journal of Economic Perspective*, 14(3), 217-232.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Penebit Kencana.
- Tarigan, R. (2002). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Medan: Direktorat Pembinaan dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Thaib, H. S. (2017). Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia. *Seminar Kerangka Fiskal Pendanaan Pariwisata Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah/Limbah Perkotaan* (pp. 1-80). Jakarta: Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Wisata Prioritas.
- Thoha, M., & Soekarni, M. (2000). Studi kelayakan ekonomi pembentukan provinsi baru : kasus Banten. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 7(2), 45-77.
- Todaro, M. P. (1984). *Ilmu Ekonomi: Bagi Negara Sedang Berkembang, Suatu Pengantar Mengenai Dasar-Dasar Masalah dan Kebijakan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Wang, J. (2012). The economic impact of special economic zones: evidence from Chinese municipalities. *Journal of Development Economics*, 101(2013), 133-147.
- Widianingsih, W., & Suryantini, A. I. (2015). Kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(2), 206-218.
- Witjaksono, M. (2009). Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 1(1), 3-12.